

Sering Dibahas Saat Rapat Anggaran, Paket Perlengkapan Sekolah Gratis Seharusnya Bisa Semua Siswa



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,02/2/2024

Program penyaluran paket perlengkapan sekolah gratis yang tidak menjangkau seluruh siswa di jenjang SD dan SMP dipertanyakan wakil rakyat.

BONTANG - Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai, sebelumnya pihaknya kerap meminta eksekutif agar program ini tidak hanya diberikan kepada peserta didik baru. Khususnya kelas I SD dan VII SMP, baik itu seragam, tas, maupun sepatu.

"Setiap pembahasan anggaran bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kami selalu bersuara. Tetapi eksekutif memiliki arah kebijakan tersendiri," kata Andi Faiz.

Padahal politikus Partai Golkar ini menilai, bantuan itu sangat diperlukan. Artinya ketika siswa membutuhkan perlengkapan sekolah, tidak perlu lagi membebani orangtua dengan jalan membeli perlengkapan sekolah baru.

"DPRD selalu mendorong kualitas pendidikan semakin baik di tiap tahun. Termasuk dengan penganggaran terkait pemberian bantuan langsung kepada masyarakat," ucapnya.

Ia pun menyinggung jika ada kendala pada regulasi, faktanya, daerah lain bisa melaksanakan dengan sasaran seluruh siswa. Andi Faiz mengambil contoh Kutai Timur yang tahun ini melakukan perubahan penerima bantuan dari siswa baru ke seluruh pelajar.

"Artinya kalau tembok penghalangnya karena regulasi, itu patah karena daerah lain bisa," tutur dia.

Apalagi Disdikbud Bontang berencana membagikan seragam batik ke seluruh pelajar negeri dan swasta. Dari SD hingga SMP. Ia menilai, sebaiknya anggaran yang tidak penting diarahkan ke penyaluran bantuan ini.

Senada, Wakil Ketua DPRD Agus Haris juga menilai tidak ada inisiatif Pemkot untuk menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah gratis kepada seluruh siswa. Padahal, dengan kebijakan itu, meringankan beban orang tua. "Paling tidak mereka tidak mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan sekolah baru," terangnya.

Aspek pendidikan itu penting karena bisa mencetak generasi penerus bangsa berkualitas. Politikus Partai Gerindra pun meminta agar segera dilakukan perubahan perencanaan untuk penyaluran bantuan tahun depan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya seluruh siswa.

"Kalau karena belum ada perubahan perencanaan, harus disegerakan untuk tahun depan," pintanya. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah memastikan penerima bantuan tidak mengalami perubahan dari pemberian sebelumnya. Hal ini dibenarkan Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono. "Terkait penerima bantuan itu tetap siswa baru meliputi kelas I SD dan VII SMP," kata Bambang.

Kebijakan itu lantaran mengacu pada perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Sebab, jika menyasar seluruh siswa di jenjang SD dan SMP membutuhkan perencanaan baru. Ia pun menyadari legislator karena menginginkan adanya perubahan penerima bantuan.

"Perencanaan untuk siswa baru. Kajian itu dilakukan tahun sebelumnya. Apalagi saat ini anggaran sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa bertambah," ucapnya.

Jadi, jika diubah, harus membuat kajian perencanaan kembali. Secara otomatis di tahun berikutnya. Saat disinggung apakah ada perubahan penerima bantuan di tahun depan, ia menunggu arahan kepala daerah. "Perlu ada pembahasan lebih lanjut. Sejauh ini kebijakan pimpinan masih sama," tutur dia. **(ak/ind/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sering Dibahas Saat Rapat Anggaran, Paket Perlengkapan Sekolah Gratis Seharusnya Bisa Semua Siswa, 02/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar (Perwali Kota Bontang 11/2022), satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar meliputi:
 - a. SD/MI; dan
 - b. SMP/MTs.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perwali Kota Bontang 11/2022, perlengkapan sekolah berupa:
 - a. pakaian seragam nasional;
 - b. tas;
 - c. sepatu;
 - d. buku mata pelajaran; dan
 - e. alat tulis.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perwali Kota Bontang 11/2022, pengadaan perlengkapan sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa.